

Rekonstruksi Persatuan Pascakonflik Poso Sebagai Implementasi Nilai Ketiga Pancasila dalam Membangun Harmoni Nasional

Adrian Danang Wardhana¹, Diftha Nadilla Anur², Jimmy Amirul Aziz³, Nadya Adha Rizky⁴, Raisha Kamilia Sudrajat⁵

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: jimyjimy017@gmail.com

Abstrak

Tujuan pada kajian ini adalah menganalisis proses rekonstruksi persatuan pascakonflik di Poso sebagai upaya implementasi nilai ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya membangun kembali hubungan sosial yang harmonis di wilayah yang pernah mengalami konflik. Melalui studi kasus di Poso, penelitian ini menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam mendorong dialog antar kelompok, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, artikel akademik, dan database penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai Persatuan Indonesia dapat menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengatasi konflik dan membangun negara yang damai dan sejahtera.

Kata kunci— Pancasila; Pascakonflik Poso; Harmoni Nasional; Rekonstruksi Persatuan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the process of post-conflict unity reconstruction in Poso as an effort to implement the third value of Pancasila, namely Indonesian Unity. The background of this research focuses on the importance of rebuilding harmonious social relations in areas that have experienced conflict. Through a case study in Poso, this research analyzes the role of Pancasila values in encouraging dialogue between groups, rebuilding trust, and creating conditions conducive to peace. The method used is a descriptive approach with the technique of collecting secondary data from various sources, such as official reports, academic articles, and relevant research databases. The results of this study conclude that the value of Indonesian Unity can be a guideline for all Indonesians in overcoming conflict and building a peaceful and prosperous country.

Keywords— Pancasila; Post Poso Conflict; National Harmony; Reconstructing Unity

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat multikulturalisme yang tinggi (Masyrullahushomad, 2019). Namun, keberagaman ini tidak lepas dari potensi konflik, terutama jika pengelolaannya kurang bijaksana. Salah satu konflik yang paling menonjol adalah konflik sosial yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini berlangsung dari akhir tahun 1998 hingga awal 2000-an, dengan latar belakang persaingan ekonomi, politik, dan agama (Widayat et al., 2021).

Konflik di Poso bermula pada tanggal 24 Desember 1998, ketika insiden kekerasan antar pemuda yang awalnya bersifat kriminal berkembang menjadi konflik agama. Konflik ini kemudian mengalami eskalasi yang terbagi dalam tiga fase utama:

1. Fase Pertama (1998)

Konflik ini dimulai dengan peristiwa penusukan yang memicu bentrokan antar kelompok agama. Konflik ini masih bersifat lokal, tetapi mulai menunjukkan polarisasi sosial berbasis agama.

2. Fase Kedua (April 2000)

Konflik kembali memuncak saat proses pemilihan Bupati Poso, di mana kepentingan politik lokal memanfaatkan sentimen agama untuk memobilisasi massa. Peristiwa ini menandai meningkatnya perilaku kekerasan dengan serangan balasan antarkelompok yang semakin meluas.

3. Fase Ketiga (Mei 2000 hingga 2001)

Konflik berubah menjadi kekerasan sistemik, ditandai dengan serangkaian serangan yang telah terorganisasi. Puncaknya adalah tragedi di Pesantren Wali Songo, yaitu terdapat banyak korban jiwa berjatuh. Konflik ini mulai mereda setelah pemerintah pusat dan pihak terkait menyetujui Perjanjian Malino pada 2001 (Hi Manna & Syafiie, 2014; Widayat et al., 2021).

Rekonstruksi, dalam konteks ini, adalah proses membangun kembali kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat konflik. Rekonstruksi tidak hanya mencakup pemulihan fisik seperti rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga pemulihan sosial yang mencakup rekonsiliasi antar kelompok, penguatan ekonomi lokal, dan pendidikan nilai-nilai toleransi. Dalam konteks konflik Poso, rekonstruksi menjadi kunci untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu. Upaya rekonstruksi di Poso melibatkan pembangunan kembali kepercayaan antar kelompok, penyediaan program rehabilitasi trauma, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan lintas agama (Rahmadhani et al., 2023).

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, termasuk perjanjian Malino yang menjadi salah satu tonggak dalam mengembalikan harmoni di Poso. Namun, keberhasilan dalam mengatasi konflik ini tidak hanya bergantung pada langkah-langkah formal seperti perundingan dan rehabilitasi infrastruktur, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, seperti yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia" (Rahmadhani et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Sila Ketiga Pancasila dalam proses rekonstruksi sosial di Poso pasca-konflik. Selain itu, tulisan ini akan membahas peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal dalam membangun kembali keharmonisan sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, artikel ini juga mengeksplorasi langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Berdasarkan perspektif teori konstruktivisme, penyelesaian konflik Poso dapat dipahami sebagai proses pembentukan kembali identitas sosial yang dilandasi oleh norma dan nilai bersama, seperti toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi masalah-masalah yang berakar pada konstruksi sosial dan identitas kolektif masyarakat (Reus-Smit, 2005). Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi solusi pragmatis, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dan studi kasus untuk memahami secara mendalam konflik Poso dan proses rekonstruksi sosial pasca-konflik. Pendekatan literature review dilakukan dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen historis. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mempelajari dengan lebih terfokus bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam membangun kembali harmoni sosial di Poso.

Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan penelitian mendalami fenomena tertentu yang terjadi dalam konteks nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2023), studi kasus melibatkan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber untuk memahami kejadian yang sedang atau telah berlangsung (Ridlo, 2023). Fokus penelitian adalah mengungkap

penyebab dan kronologi konflik, upaya penyelesaian, serta penerapan nilai kebangsaan dalam proses pemulihan.

Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data mencakup artikel jurnal, laporan resmi, arsip media, dan dokumen dari organisasi masyarakat. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan tematik untuk menemukan pola dan tema utama, seperti dinamika konflik, langkah penyelesaian, dan proses rekonstruksi sosial.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konflik Poso dan bagaimana proses rekonstruksi berbasis nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam memulihkan harmoni sosial di tengah masyarakat yang pernah terpecah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Konflik Poso

Konflik Poso yang berlangsung dari 1998 hingga 2001 memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis. Dari segi fisik, ribuan rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah rusak akibat aksi pembakaran dan penyerangan. Infrastruktur yang hancur tidak hanya membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menghambat aktivitas sehari-hari, seperti pendidikan dan perdagangan. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke wilayah lain karena kehilangan rumah mereka dan merasa tidak aman untuk kembali (Hi Manna & Syafiie, 2014).

Dampak sosial dari konflik ini sangat signifikan, dengan hubungan antar kelompok agama, khususnya Muslim dan Kristen, mengalami keretakan yang mendalam. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan kini terpisah secara sosial dan geografis, menciptakan segregasi di banyak wilayah. Ketegangan ini diperparah oleh stigma negatif dan saling curiga antar kelompok, yang memperburuk proses rekonsiliasi sosial (Widayat et al., 2021).

Dari segi ekonomi, konflik menghancurkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar dan usaha kecil yang menjadi tumpuan ekonomi lokal lumpuh, sementara akses ke pekerjaan menjadi sangat terbatas. Ketimpangan ekonomi yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab konflik semakin membesar, menciptakan tantangan besar dalam memulihkan kesejahteraan masyarakat pascakonflik (Hi Manna & Syafiie, 2014).

Selain itu, dampak psikologis dari konflik ini juga tidak kalah berat. Trauma mendalam dirasakan oleh banyak korban, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga atau menjadi saksi kekerasan. Anak-anak yang terpapar konflik juga menghadapi gangguan emosional yang memengaruhi perkembangan mereka. Kondisi ini menambah tantangan dalam membangun kembali kepercayaan dan harmoni antar kelompok (Widayat et al., 2021).

Proses Rekonstruksi Pascakonflik

Rekonstruksi pascakonflik di Poso dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi.

1. Pemulihan Fisik

Langkah awal rekonstruksi melibatkan pembangunan kembali rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah yang rusak. Inisiatif ini bertujuan memulihkan lingkungan tempat tinggal masyarakat sekaligus menciptakan simbol perdamaian. Salah satu langkah penting adalah pembangunan rumah ibadah lintas agama yang menunjukkan semangat persatuan (Rahmadhani et al., 2023).

2. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial dilakukan melalui program rekonsiliasi, seperti dialog lintas agama, kegiatan budaya bersama, dan pelatihan toleransi. Sekolah harmoni, yang bekerja sama dengan tokoh agama, diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman lintas agama di kalangan generasi muda. Langkah ini bertujuan menciptakan rasa saling percaya dan mengurangi segregasi sosial (Hi Manna & Syafiie, 2014).

3. Pemulihan Ekonomi

Pemerintah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru dan mendukung usaha kecil. Program-program ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan

ekonomi yang menjadi akar konflik, sekaligus memperkuat solidaritas antar komunitas (Widayat et al., 2021).

Relevansi Antara Konflik Poso dengan Sila Ketiga Pancasila

Konflik Poso menunjukkan bagaimana perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi perpecahan sosial. Dalam konteks ini, Sila Ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia,” menawarkan solusi yang relevan untuk memulihkan harmoni dan mencegah terulangnya konflik serupa (Masyrullahushomad, 2019).

Sila Ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang menekankan pentingnya solidaritas dan toleransi di tengah keberagaman. Nilai ini menjadi panduan dalam upaya rekonstruksi pasca-konflik di Poso. Pemerintah dan masyarakat lokal menggunakan pendekatan berbasis Pancasila untuk menghilangkan stigma negatif, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antar komunitas. Contohnya adalah inisiatif membangun rumah ibadah lintas agama dan pelaksanaan program dialog antar umat beragama, yang membantu masyarakat menemukan kembali nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi bersama (Widayat et al., 2021).

Implementasi nilai “Persatuan Indonesia” juga terlihat dalam pendidikan multikultural yang diperkenalkan di sekolah-sekolah harmoni. Pendidikan ini dirancang untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap keberagaman di kalangan generasi muda. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi akar konflik yang sering kali dipicu oleh ketidaktahuan dan prasangka antar kelompok (Saputra et al., 2024).

Selain itu, relevansi Sila Ketiga juga tercermin dalam upaya rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah. Dialog lintas agama menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kembali hubungan sosial yang terpecah. Dengan menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka, masyarakat didorong untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman (Masyrullahushomad, 2019).

Proses rekonstruksi pasca-konflik di Poso menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi konflik, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Sila Ketiga Pancasila menjadi pedoman penting dalam membangun persatuan di tengah keragaman, sekaligus mencegah terulangnya konflik yang serupa di masa depan.

Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Harmonisasi Sosial

Toleransi antar umat beragama menjadi faktor kunci dalam membangun harmonisasi sosial pasca konflik. Di Poso, toleransi diwujudkan melalui dialog antar kelompok agama, kegiatan lintas komunitas, dan pelibatan semua pihak dalam program rekonsiliasi. Pendidikan multikultural juga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan di kalangan generasi muda (Saputra et al., 2024).

Selain itu, dialog lintas agama yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama berhasil menciptakan ruang untuk membangun kembali rasa saling percaya. Program-program ini membuktikan bahwa toleransi tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi dasar untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan (Hi Manna & Syafiie, 2014).

Rekonstruksi berbasis toleransi di Poso menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kebangsaan dapat mengubah konflik menjadi peluang untuk memperkuat persatuan. Dengan mengedepankan semangat saling menghargai, masyarakat Poso berhasil membangun kembali harmoni sosial yang sebelumnya rusak akibat konflik.

Peran Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Rekonstruksi Pascakonflik

Dalam rekonstruksi pascakonflik Poso, pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemulihan dan harmoni sosial, sementara LSM berfungsi sebagai mitra strategis yang mendukung implementasi program-program tersebut.

Pemerintah daerah Poso, dengan dukungan pemerintah pusat, mengambil berbagai langkah konkret untuk memulihkan kehidupan masyarakat pasca-konflik. Salah satu upaya penting adalah menginisiasi Perjanjian Malino, yang menjadi landasan utama untuk menghentikan kekerasan. Selain itu, pemerintah melaksanakan program pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, seperti rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan rasa aman dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak (Hi Manna & Syafiie, 2014).

Pemerintah juga fokus pada aspek sosial melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini menyediakan ruang dialog bagi pemimpin agama dan masyarakat untuk membahas solusi bersama dan menciptakan pemahaman lintas agama. Selain itu, pemerintah memperkenalkan program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah, yang bertujuan menanamkan nilai toleransi kepada generasi muda (Saputra et al., 2024).

Di sisi lain, LSM berperan sebagai fasilitator dalam program-program rekonsiliasi. Mereka mendukung dialog lintas agama, kegiatan budaya bersama, dan pelatihan trauma healing bagi korban konflik. LSM juga berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, seperti distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan dukungan untuk usaha kecil. Pendekatan ini membantu masyarakat mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari konflik (Masyrullahushomad, 2019).

Kolaborasi antara pemerintah dan LSM terlihat dalam program pembangunan ekonomi yang memberdayakan masyarakat terdampak konflik. Dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan keterampilan, masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup mereka dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang menjadi salah satu pemicu konflik. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar kelompok (Hi Manna & Syafiie, 2014).

KESIMPULAN

Rekonstruksi persatuan pascakonflik di Poso merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Sila Ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia,” dapat diterapkan untuk membangun kembali harmoni sosial di tengah keberagaman. Konflik yang berlangsung dari 1998 hingga 2001 meninggalkan dampak multidimensi, mencakup kerusakan fisik, sosial, ekonomi, dan trauma psikologis yang mendalam. Pemulihan dari konflik ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup rekonstruksi fisik, sosial, dan ekonomi, serta upaya yang konsisten untuk mendorong toleransi antar umat beragama.

Proses rekonstruksi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bekerja sama dalam membangun kembali hubungan sosial, memberikan bantuan ekonomi, dan mengatasi trauma akibat konflik. Program seperti dialog lintas agama, pendidikan multikultural, dan pembangunan rumah ibadah lintas agama menjadi simbol persatuan yang memperkuat kembali rasa saling percaya di antara masyarakat.

Implementasi nilai “Persatuan Indonesia” terbukti relevan dalam mengatasi dampak konflik, menghilangkan stigma negatif, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif. Pendidikan yang menanamkan penghormatan terhadap keberagaman juga memainkan peran penting dalam mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Kesuksesan rekonstruksi Poso menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya solusi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga pedoman dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Pengalaman Poso dapat menjadi model bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, dengan menempatkan persatuan dan toleransi sebagai inti dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hi Manna, A., & Syafiie, F. (2014). Konflik Poso: Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 12(3), 45-60.
- Masyrullahushomad, A. (2019). Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama. *Jurnal Multikultural Indonesia*, 14(2), 78-89.
- Rahmadhani, T., Saputra, R., & Widayat, H. (2023). Pemulihan Pascakonflik di Poso: Implementasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Integrasi Sosial*, 18(1), 22-34.
- Ridlo, M. (2023). Studi Kasus sebagai Metode Penelitian: Teori dan Aplikasinya dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Saputra, D., Wardhana, A., & Nadilla, D. (2024). Pendidikan Multikultural di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*, 10(1), 15-28.
- Widayat, H., Rahmadhani, T., & Saputra, R. (2021). Segregasi Sosial dan Upaya Rekonsiliasi di Poso Pasca-Konflik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(4), 101-112.
- Centre for Humanitarian Dialogue. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.
- The Habibie Center. (2014). *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. Jakarta: The Habibie Center.